

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdurrahman, 1983, *Masalah Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Ari Sukanti Hutagalung, 2002, *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum yang Berlaku*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis.
- Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Erna Sri Wibawati dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya* Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2007, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung. Nuansa.
- Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum.
- Maria Sumarjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mulyo Putro, 2002, *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Fokus Media.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Numaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Bandung : Mandar Maju.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya.

- Sunindhia Y. W dan Nanik Widiyant, 1998, *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*, Jakarta, Bina Aksara.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, cetakan 1, Jakarta, Prenada Media Group.
- Suyud Margono, 2000, *Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.

## **B. Jurnal**

- Arie V. Sendow, "Masalah Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Minahasa", *Jurnal Hukum UNSRT*, XXI (April-Juni, 2013).
- Asmawati, 2014, "Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Jurnal Ilmu Hukum*, V (Maret, 2014).
- Julius Sembiring, "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria", *Bumih Jurnal Agraria dan Pertanahan*, II (November, 2016).
- Kurnia Warman dan Syofiarti, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatra Barat (Sengketa Antara Masyarakat VS Pemerintah)", *Masalah-masalah Hukum*, XLI (Juli, 2012).
- Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo", *Mimbar Hukum*, XXVIII (Oktober 2016).
- Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I. JAKARTA", *Jurnal Hukum PRIORIS*, VI (Januari, 2017).
- Riska Fitriani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau", *Riau Law Journal*, I (November, 2017).
- Sri Hajati, Agus Sekarmadji dan Sri Winarsih, "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, XIV, (Januari, 2014).
- Triana Rejekiingsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Pemaparannya di Indonesia)", *Jurnal Media Hukum*, V (Mei – Agustus 2016).

Zainudin Yahya, "Kajian Yuridis Tentang Sengketa Tanah Yang Diperuntukkan Bagi Fasilitas Pemerintah Menurut UU No. 2 Tahun 2012", *Jurnal Lex Crimen V*, (Agustus, 2016).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3).

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 320/KPTS/2014 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul.